

LAPORAN KINERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2022

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung telah menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2021.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, tahun 2021 telah berakhir dan dapat kita lampaui ekspektasi kinerja kita bersama dengan baik. Sebagaimana kita ketahui maklum bahwa Pandemi *COVID-19* masih menjadi isu yang mempengaruhi kinerja perekonomian global, terutama Indonesia mulai mengalami lonjakan penurunan, relaksasi target di DJKN pun menjadi upaya untuk mengejar pencapaian keberhasilan IKU di wilayah kerja DJKN.

Hadirnya sambungan internet di dalam kehidupan manusia mengundang implikasi pada pengembangan teknologi internet itu sendiri. Pengembangan teknologi internet khususnya di Kementerian Keuangan terlihat jelas kita rasakan setelah mewabahnya pandemi *COVID-19* ini, pemerintah pusat dengan sigapnya melakukan transisi perpindahan kerja menjadi serba digitalisasi. Sebagai pegawai Kementerian Keuangan kita dituntut untuk belajar dan bekerja dengan cepat dan tepat. Hal ini berbanding lurus dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 KPKNL Bandar Lampung yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung dengan cukup baik sebesar 112,13%.

Tidak kalah penting dan yang paling utama, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, atas kinerja dan kerja sama yang baik sehingga KPKNL Bandar Lampung mampu mencatat berbagai pencapaian selama tahun 2021.

Selamat bekerja kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, tetap bersinergi, terus semangat dan semoga sukses di tahun 2022 ini.

Bandar Lampung, 02 Februari 2022
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Haryanto

NIP 19720825 199301 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	4
C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rincian Capaian Kinerja KPKNL Bandar Lampung.....	10
Tabel 3. 2 Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.....	11
Tabel 3. 3 Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	12
Tabel 3. 4 Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung.....	13
Tabel 3. 5 Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara.....	13
Tabel 3. 6 Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang.....	14
Tabel 3. 7 Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	15
Tabel 3. 8 Perbandingan capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang pada KPKNL Bandar Lampung.....	15
Tabel 3. 9 Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL.....	16
Tabel 3. 10 Perbandingan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung.....	17
Tabel 3. 11 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan.....	18
Tabel 3. 12 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).....	19
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Bandar Lampung.....	19
Tabel 3. 14 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.....	20
Tabel 3. 15 Persentase efektivitas penyelesaian BKN.....	21
Tabel 3. 16 Persentase produktivitas lelang.....	22
Tabel 3. 17 Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction.....	23
Tabel 3. 18 Data PNBFP Fungsional DJKN.....	24
Tabel 3. 19 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi.....	24
Tabel 3. 20 Target dan Realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung.....	25
Tabel 3. 21 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara.....	25
Tabel 3. 22 Persentase pengembangan kompetensi pegawai.....	27
Tabel 3. 23 Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK.....	28
Tabel 3. 24 Nilai hasil review pengelolaan kinerja.....	29
Tabel 3. 25 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai.....	30
Tabel 3. 26 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.....	30
Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	31
Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung.....	3
Gambar 2. 1 PETA STRATEGI KPKNL BANDAR LAMPUNG (KEMENKEU-THREE).....	7
Gambar 3. 1 Indikator Kinerja Utama.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

KPKNL Bandar Lampung adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN yaitu: "Menjadi pengelola kekayaan Negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sementara Misi KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bandar Lampung mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KPKNL Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengadilan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul
5. Penghapusan piutang negara;
6. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

7. Pelaksanaan pelayanan lelang;
8. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
9. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
10. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta hartakekayaan lain;
11. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
12. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
13. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
14. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dibatasi dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Adapun wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung tersebar dalam 1 (satu) kota dan 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung yang meliputi: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.

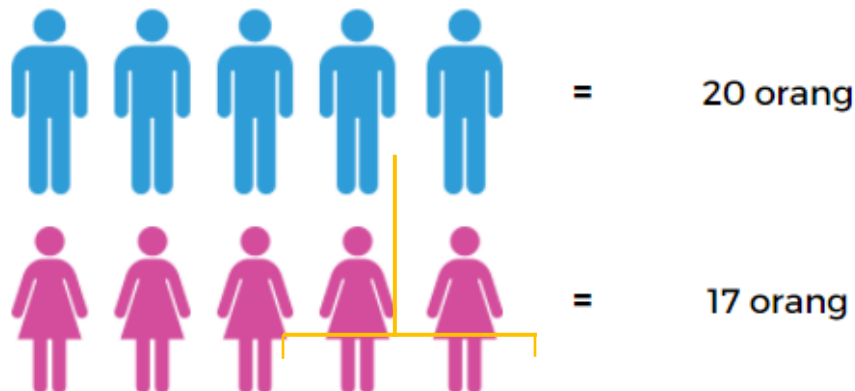
Untuk menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor yang didukung oleh enam Kepala Seksi, satu Kepala Subbagian Umum, serta tiga Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi KPKNL Bandar Lampung tergambar pada Struktur Organisasi di bawah ini:

Struktur Organisasi

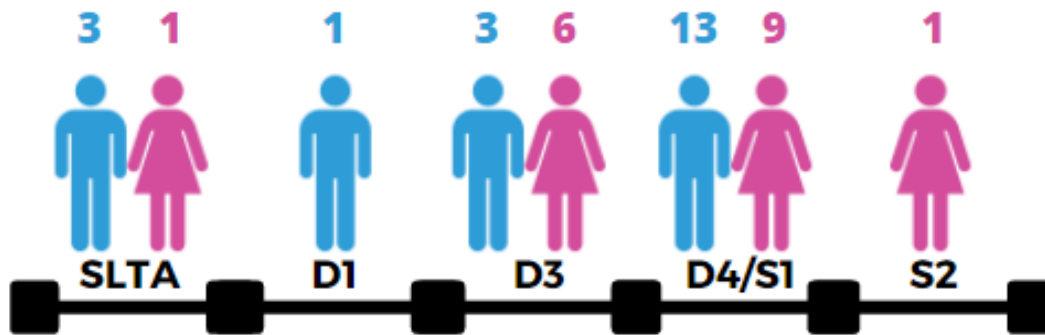
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Bandar Lampung didukung oleh 37 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

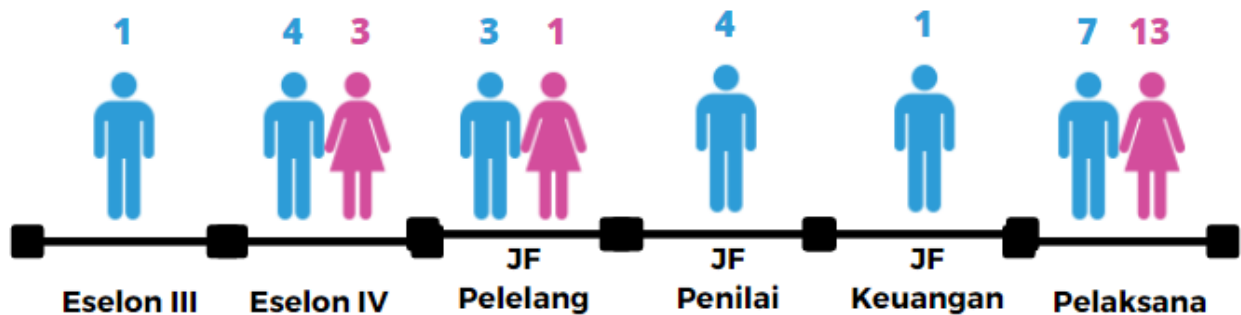
Tabel 1. 1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN



Tabel 1. 2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN



Tabel 1. 3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Bandar Lampung dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara antara lain:

- Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, dengan ketentuan seluruh BMN telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya;
- Pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang efektif;
- Penatausahaan dan pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- Kesadaran akan kepatuhan pengguna layanan (*stakeholder*) yang tinggi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara adalah:

- Pengembangan dan implementasi *capacity building* secara periodik dan masif terkait teknis, manfaat sektoral dan nasional pengelolaan aset pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai upaya pemanfaatan aset melalui mekanisme kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum;

- c. Pengembangan dan penerapan layanan virtual secara bertahap untuk seluruh jenis layanan kepada pengguna jasa.

2. Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, *In House Training* di bidang penilaian.
- b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
- c. Melakukan survey data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah KPKNL Bandar Lampung.
- d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

3. Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNPB dari pengurusan piutang negara yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pengurusan piutang negara ke instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penggalan potensi piutang K/L dan piutang pemerintah daerah.
- b. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui tahapan pemeriksaan.

4. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNPB dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non Eksekusi.
- b. Improvisasi dan inovasi layanan lelang guna peningkatan pelayanan lelang melalui pojok *e-auction*.
- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang yang dilakukan melalui pelaksanaan *Forum Grup Discussion (FGD)* yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana *sharing knowledge* bagi Pejabat Lelang.

5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan, *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.

- c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
- e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Pengelolaan kinerja yang efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.
- c. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- d. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para stakeholder.
- e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan sharing knowledge.
- f. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF

Dalam pencapaian kinerja tahun 2021, KPKNL Bandar Lampung menghadapi berbagai kendala diantaranya:

1. Pandemi Covid-19 yang melanda sepanjang tahun membuat pelayanan kepada *stakeholders* menjadi terhambat
2. Respon Satker terhadap pelaksanaan sertifikasi kurang optimal dan bidang tanah yang disertifikatkan tersebar di beberapa wilayah.
3. Piutang yang diserahkan pengurusannya ke KPKNL tidak di dukung dengan barang jaminan
4. Penanggung hutang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya.
5. Rendahnya tingkat kesadaran para penanggung hutang untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun secara ekonomi mampu.
6. Obyek lelang kurang marketabel dikarenakan, obyek lelang tersebut masih berpenghuni, terdapat sengketa agraria di daerah tertentu, nilai limit tinggi tidak sebanding dengan resiko sehingga minat beli terhadap obyek lelang tersebut rendah.
7. Pengajuan permohonan lelang hak tanggung dilakukan oleh bank sebagai salah satu upaya *shock* terapi kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga frekuensi laku lelang tidak sebanding dengan lelang yang diajukan.

Langkah-langkah adaptif ke depan yang akan dilakukan oleh KPKNL Bandar Lampung untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Membuat inovasi pelayanan berupa Area Pelayanan Terpadu Virtual sebagai bentuk adaptasi peningkatan kualitas pelayanan kepada para stakeholders.
2. Membangun budaya *asset awareness* (tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik) yang efektif, efisien dan optimal di level satuan kerja;
3. Meningkatkan pengelolaan asset sebagai instrument APBN melalui penerimaan PNBPN dan pembiayaan belanja modal dan infrasutruktur;
4. Membangun budaya virtual yang efektif dalam proses layanan asset, Piutang Negara dan Lelang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 tertuang pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung dihadapan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Peta Strategi pada KPKNL Bandar Lampung Tahun 2021 memuat 10 Sasaran Strategis yang terdiri dari: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien; (4) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif; (5) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang efektif; (6) Edukasi yang efektif; (7) Pengawasan dan pengendalian yang efektif; (8) SDM yang kompeten; (9) Organisasi yang *fit for purpose*; (10) Pengelolaan Keuangan yang Optimal.



Gambar 2. 1 PETA STRATEGI KPKNL BANDAR LAMPUNG (KEMENKEU-THREE)
TAHUN 2021

Tabel 2. 1 PERJANJIAN KINERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	87
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,40 (Skala 5)
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK**	75
		9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

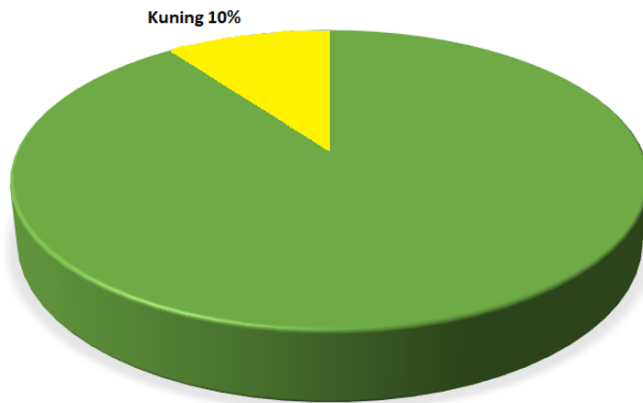
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 dilakukan dengan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021 KPKNL Bandar Lampung menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategi yang terjabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ikhtisar capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 tercatat bahwa dari 20 (dua puluh) IKU terdapat 18 (delapan belas) IKU dengan status hijau (90%) dan 2 (dua) IKU dengan status kuning (10%). Ikhtisar capaian kinerja unit Eselon III KPKNL Bandar Lampung tergambar dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Indikator Kinerja Utama

1. I
K
U
d
e
n
g
a
n
s
t
a
t
u
s



IKU dengan Status Kuning:

1. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM
2. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

hijau sejumlah 18 (tujuh belas) IKU yang terdiri dari IKU:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
- b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP);
- c. Persentase Penurunan outstanding piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017);
- d. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang;
- e. Persentase realisasi pokok lelang;
- f. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL;
- g. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan;
- h. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset);
- i. Deviasi ketergunaan hasil penilaian;
- j. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN;
- k. Persentase produktivitas lelang;
- l. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction;
- m. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN;
- n. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
- o. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara;

- p. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- q. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM;
- r. Nilai hasil review pengelolaan kinerja;
- s. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator;
- t. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

2. IKU dengan status kuning sejumlah 2 (dua) IKU yaitu:
 - a. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM; dan
 - b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2021 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 112,13% dengan rincian data capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Capaian Kinerja KPKNL Bandar Lampung

No.	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian	Indeks
1	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	83,98%	135,444%	120,00%
	1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	110,54%	110,545%	120,00%
	1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	260%	259,95%	120,00%
2	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87,00	98,83	113,60%	113,60%
	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	120,82%	120,82%	120,82%
3	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,4	4,56	103,64%	103,64%
4	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	122,29%	122,29%	120,00%
	4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	103,16%	103,16%	103,16%
	4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	0,00%	200,00%	120,00%
5	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	102,14%	102,14%	102,14%
	5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35,00%	37,87%	108,20%	108,20%
	5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%	100,00%	108,70%	108,70%
	5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%	0,00%	200,00%	120,00%
6	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	95,29	107,06%	107,06%
7	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	98,80%	116,23%	116,23%
8	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%	120,00%

9	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75,00	74,00	98,67%	98,67%
	9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75,00	90,06	120,08%	120,00%
	9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	96,60	120,75%	120,00%
10	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	94,85%	99,32%	99,32%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						112,13%

Evaluasi dan analisa kerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. 1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Pada Tahun 2021, IKU **Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK** telah tercapai sebesar 83,98% dari target 62% (120%)

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat untuk memastikan manal IKU dan kesediaan kerja kerja pengukuran SBSK.
3. Melakukan inventarisasi data dukung pengukuran SBSK dari satuan kerja terpilih.
4. Mengupayakan koordinasi dengan satuan kerja dengan memanfaatkan media elektronik.

Capaian Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal						
	1a-CP Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	PoI/ K P
Target	-	50%	50%	55%	62%	62%	Min/TLK
Realisasi	0%	29,50%	29,50%	83,94%	83,98%	83,98%	
Capaian setelah adendum	0,00%	59%	59%	120%	120%	120%	

b. 1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**, antara lain sebagai berikut:

1. Wabah pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilisasi menyulitkan optimalisasi penerimaan PNBP dari pengelolaan Aset, Piutang dan Lelang;
2. Pegawai pada satuan kerja yang dalam kondisi WFH (*Work From Home*) menyulitkan proses koordinasi pengumpulan informasi objek potensial PNBP.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi potensi satuan kerja yang dapat berkontribusi terhadap kinerja PNBP;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terpilah, antara lain satuan kerja yang memiliki potensi PNBP aset yang besar terkait permohonan persetujuan pemanfaatan BMN dan tindak lanjut dari satuan kerja tersebut setelah mengajukan permohonan adalah dengan menerbitkan persetujuan pemanfaatan;
3. Melakukan himbauan kepada seluruh satuan kerja melalui surat.

Capaian persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada KPKNL Bandar Lampung di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal						Pol/ K P
	1b-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	
Target	10%	30%	30%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	8,85%	30,46%	30,46%	51,81%	110,54%	110,54%	
Capaian	88,48%	101,53%	101,53%	86,35%	110,54%	110,54%	

Capaian IKU sebesar 110,54% dengan realisasi nilai manfaat ekonomi Rp15.406.635.413,00 diperoleh dari komponen penerimaan negara yang berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN = Rp9.219.015.106 (dari target Rp7.800.000.000).
- b. PNBP Piutang Negara = Rp50.516.459 (dari target Rp27.000.000).
- c. PNBP Lelang = Rp6.137.103.848 (dari target Rp6.110.000.000).

Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2018 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung

	2018		2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	2.252.775.511	3.950.012.196	1.449.009.395	5.381.762.503

PNBP Piutang Negara	68.254.069	30.990.633	51.474.247	28.849.076
PNBP Lelang	2.555.558.061	2.555.558.061	6.671.660.000	5.087.574.173
	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	7.526.415.000	7.796.577.649	7.800.000.000	9.219.015.106
PNBP Piutang Negara	869.641	7.096.870	27.000.000	50.516.459
PNBP Lelang	7.220.000.000	5.171.082.677	6.110.000.000	6.137.103.848

c. 1c-CP Persentase Penurunan outstanding piutang Negara (Saldo PNDS s.d 2017)

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)**, antara lain pada Triwulan I *outstanding* sudah mencapai target. Tercatat sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 *outstanding* yang dicapai adalah Rp934.446.959 dari target Rp359.476.452 (259,95% dengan Indeks Max 120,00%).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan PSBDT (terutama yang bernilai dibawah Rp8.000.000,00 karena tidak memerlukan survey lapangan).
2. Melaksanakan pengurusan berkas BKN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

Tabel 3. 5 Tingkat Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal						
	1c-CP Tingkat Penurunan <i>outstanding</i> piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	98%	75%	75%	187%	260%	260%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a. 2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang

Dalam program menuju manajemen pelayanan yang berkualitas, penempatan petugas khusus untuk memonitoring pelaksanaan layanan kiranya perlu dipersiapkan dengan baik agar ketepatan

pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma waktu/ *Standard Operating Procedure* (SOP), dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga capaian untuk Q4 IKU ketepatan waktu layanan dapat dijaga dengan baik. Akar masalah dari IKU antara lain adalah karena masih terdapat proses bisnis yang tidak mematuhi SOP, sehingga perlu *extra effort* dalam mengupayakan percepatan respon atas setiap proses permohonan dari pengguna layanan. Untuk memberikan kepastian janji layanan kepada pengguna jasa. Dengan implimentasi penuh pemanfaatan Nadine, diharapkan dapat semakin mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada pengguna jasa.

Capaian Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	87	-	87	87	87	87	Max/AVG
Realisasi	100,00	-	100,00	98,97	98,83	98,83	
Capaian	114,94%		114,94%	113,76%	113,60%	113,60%	

b. 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase Realisasi Pokok lelang diperoleh dari realisasi pokok lelang dibagi dengan target pokok lelang yang ditetapkan. Untuk realisasi pokok lelang bersumber dari lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian. Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase Realiasasi Pokok Lelang**, antara lain sebagai berikut:

1. Barang yang dilelang tidak *free and clear* (masih berpenghuni/masih ada permasalahan) namun guna mencapai target yang diharapkan upaya menjadikan laku tetap menjadi prioritas utama.
2. Masih banyaknya masyarakat belum sadar lelang dan tidak mengetahui bagaimana alur lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan indentifikasi target per jenis objek lelang.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan pelaksanaan lelang barang gadai.
3. Membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan BPR dan *stakeholder* potensial.
4. Sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholder* agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*.

Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Persentase Realisasi Pokok Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	9,72%	31,90%	31,90%	51,53%	120,82%	120,82%	
Capaian	48,61%	79,75%	79,75%	73,61%	120,00%	120,00%	

Realisasi IKU ini terdiri berasal dari capaian pokok lelang berasal dari :

- Pejabat Lelang Kelas I sebesar Rp123.136.697.462 dari target Rp108.000.000.000 (114,02%)
- Pegadaian sebesar Rp49.639.497.500 dari target Rp35.000.000.000 (141,83%)

Sehingga total capaian adalah **Rp172.776.194.962 dari target Rp143.000.000.000 (120%)**.

Perbandingan capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang pada KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2018 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang pada KPKNL Bandar Lampung

Persentase Hasil Pokok Lelang	2018	2019	2020	2021
Target	97.713.000.000	180.335.000.000	191.270.000.000	143.000.000.000
Realisasi	49.015.052.105	144.993.911.829	136.332.200.636	172.776.194.962

3. Sasaran Strategis: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan oleh pegawai KPKNL Bandar Lampung. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*Quick Win*). Survey dilakukan secara mandiri dengan menyampaikan kuesioner kepada pengguna layanan baik pada bidang pengelolaan kekayaan Negara, piutang Negara, penilaian, dan lelang. Kuesioner dibagikan kepada para satuan kerja pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020, yang selanjutnya dilakukan kompilasi dan penghitungan indeks kepuasan pengguna layanan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

K-Wide	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien						
	3a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	4,40	4,40	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	4,56	4,56	
Capaian					103,64%	103,64%	

Realisasi IKU yang diperoleh dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL terdiri atas rincian sebagai berikut:

No	Bidang Layanan	Total Indeks
1	Pengelolaan Kekayaan Negara	4,58
2	Piutang Negara	4,65
3	Pelayanan Penilaian	4,51
4	Pelayanan Lelang	4,52
TOTAL IKPL		4,56

Sehingga rata-rata dari seluruh capaian IKPL tersebut di atas adalah 4,56 dari target 4,40 (capaian=103,64%). Hal tersebut dapat dicapai KPKNL Bandar Lampung dengan capaian di atas target yang ditetapkan dengan selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada, dan selalu menerima masukan berupa kritikan dan saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk peningkatan layanan pada periode berikutnya.

Perbandingan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung selama 4 tahun dari tahun 2018 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung

	2018		2019		2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,25	4,52	4,37	4,4	4,37	4,59	4,40	4,56

4. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

a. 4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemsertifikatan BMN berupa Tanah. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat.
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada Kemeterian/Lembaga berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik.
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan.
4. Kemeterian/Lembaga melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan.
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan.
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara DJKN dengan satuan kerja, BPN mempercepat realisasi sertifikasi
2. BPN melaksanakan percepatan realisasi sertifikasi

Capaian Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan oleh KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						
	4a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	20%	20%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	121,67%	121,67%	122,29%	122,29%	122,29%	
Capaian		120,00%	120,00%	120%	120%	120%	

Capaian 120% diperoleh oleh KPKNL Bandar Lampung dari 1.126 bidang tanah BMN yang ditargetkan untuk disertifikasi terealisasi di tahun 2021 sejumlah 1.377 (122,29 % dengan indeks max 120%) bidang tanah BMN yang disertifikatkan.

b. 4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN, maka ditetapkanlah KMK Nomor 349/KM.0/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN. Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN diterapkan ketika Kementerian/Lembaga membutuhkan informasi tentang bagaimana portofolio BMN mereka berkinerja, khususnya untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan pengelolaan BMN terkait:

1. Perencanaan aset strategis untuk memenuhi kebutuhan seluruh entitas pemerintah pusat/Kementerian/Lembaga;
2. Keputusan perencanaan sebelum pengadaan dan investasi, termasuk dalam proses penyusunan dokumen penganggaran khususnya alternatif pendanaan/pembiayaan aset;
3. Keputusan penghapusan dan rasionalisasi aset;
4. Keputusan penggantian/pengadaan baru;
5. Keputusan pemeliharaan, renovasi, restorasi dan everhaul aset; dan/atau
6. Benchmarking kinerja aset dan perbaikan terus-menerus.

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)** antara lain karena adanya pembatasan mobilisasi (wabah pandemic *COVID-19*), menyulitkan koordinasi dengan satuan kerja, khususnya berkenaan dengan kondisi fisik aset, mengingat satuan kerja terkait dalam posisi WFH.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi satuan kerja terpilah yang menjadi objek evaluasi kinerja BMN.
2. Koordinasi dengan satuan kerja terpilah dan BPS agar evaluasi BMN dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, misalnya mencantumkan kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN.

Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						
	4b-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Po/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	23,42%	44,94%	44,94%	84,18%	179,17%	103,16%	
Capaian	120%	99,86%	99,86%	112,24%	120%	103,16%	

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan IKU yang muncul sejak Tahun 2020. Evaluasi kinerja BMN (portofolio) di KPKNL Bandar Lampung difokuskan pada satuan kerja Kementerian Keuangan yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 telah tercapai 163 dari target 158 portofolio (103,16%).

Perbandingan Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Bandar Lampung dari tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Bandar Lampung

	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Portofolio Aset	96	172	158	163

c. 4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Dalam pelaksanaan penilaian di tahun 2021 tim penilai sempat terkendala untuk terjun langsung ke lapangan. Namun dalam pelaksanaannya, penilaian sesuai dengan SOP yang ditetapkan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19.

Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif						
	4c-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	30%	30%	Min/TLK
Realisasi	0,02%	0%	0,02%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

5. Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

a. 5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase efektivitas penyelesaian BKPN** (Berkas Kasus Piutang Negara) antara lain:

1. Pemanggilan debitur, kunjungan lapangan, penyampaian Surat Paksa yang masih minim dilakukan dan tidak dapat dilaksanakan karena terkendala biaya serta bencana *COVID-19*.
2. Umur piutang sudah lama.
3. Tidak didukung barang jaminan.
4. Keberadaan debitur tidak diketahui.
5. Dokumen pendukung tidak lengkap.
6. Penolakan pembayaran oleh debitur Karena merasa tidak memiliki hutang.
7. Lokasi debitur jauh dari perbankan sehingga terkendala untuk melakukan penyeteroran.
8. Adanya bencana *COVID-19* yang menghambat proses penagihan piutang Negara secara langsung.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan kepada debitur dan melakukan pemanggilan debitur.
2. Sosialisasi Program Keringanan Hutang (Crash Program) kepada Debitur yang memenuhi kriteria.
3. Koordinasi yang lebih intensif dengan debitur.
4. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui intensifikasi dan penelitian lapangan terhadap masing-masing penanggung hutang.
5. Mencari informasi keberadaan penanggung hutang melalui aparat kelurahan/desa setempat.
6. Melakukan kunjungan lapangan terkait pemberitahuan Surat Paksa.

7. Pembuatan PSBDT dengan nilai nominal dibawah 9 juta dan umur BKPN sudah cukup lama. Serta ditunjang dengan Surat Keterangan dari penyerah piutang ataupun surat keterangan yang dibuat oleh aparat setempat (kelurahan/desa).
8. Pada Triwulan IV telah tercapai BKPN sebanyak 143 berkas dari target 140 berkas (102,14%)

Capaian Persentase efektivitas penyelesaian BKPN oleh KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5a-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	25%	28,57%	2,57%	87,86%	102,14%	102,14%	
Capaian	100,00%	57,14%	57,14%	117,14%	102,14%	102,14%	

b. 5b-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian IKU **Persentase produktivitas lelang** adalah sebagai berikut:

1. Tinggi nya pelaksanaan lelang di KPKNL Bandar Lampung;
2. Potensi barang yang dilelang tidak *free and clear* (masih berpenghuni/masih ada permasalahan) namun masih sangat dimungkinkan ada pembeli dan laku;
3. Memungkinkan timbul masalah gugatan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya pelaksanaan lelang yang dipaksakan.

Capaian Persentase produktivitas lelang pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Persentase produktivitas lelang

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5b-CP Persentase produktivitas lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	35,00%	35,00%	Max/TLK
Realisasi	41,85%	39,86%	39,86%	35,76%	37,87%	37,87%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	108,20%	108,20%	

Realisasi IKU ini terdiri berasal dari produktivitas pelaksanaan lelang dimana Jumlah Frekuensi Lelang Laku secara keseluruhan adalah 334 dari Jumlah frekuensi lelang secara keseluruhan adalah 882.

c. 5c-CP Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

Lelang *e-Auction* dan *e-Conventional Auction* merupakan inovasi DJKN dalam rangka memberikan layanan di KPKNL, khususnya dalam hal modernisasi pelaksanaan lelang. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)
3. *E-auction* dan *e-conventional auction* pada DJKN terdiri atas penawaran tertutup (*close bidding*) dan penawaran terbuka (*open bidding*).

Isu Utama dalam pencapaian IKU adalah pelaksanaan *e-auction* menjadi target utama pelaksanaan lelang tahun 2021, sehingga implikasinya adalah pada pelayanan lelang tahun 2021 diutamakan melalui pelaksanaan *e-auction*.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan *e-auction corner* di KPKNL Bandar Lampung;
2. Sosialisasi pelaksanaan lelang melalui *e-auction* langsung kepada setiap pemohon lelang.

Capaian Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction*

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5c-CP Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

d. 5d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara Data PNBPN Lelang dan Piutang Negara dibandingkan dengan Data penerimaan PNBPN yang masuk ke kas Negara dalam 1 (satu) tahun di KPKNL Bandar Lampung.

Isu Utama dalam pencapaian IKU ini adalah guna meminimalisir perbedaan data PNBPN Piutang Negara dan Lelang dengan Jumlah PNBPN yang sesuai masuk ke kas negara .

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan secara fisik dan digital terhadap Data PNBPN yang diperoleh melalui aplikasi FocusPN dan Portal Lelang;
2. Melakukan rekonsiliasi Data PNBPN antara FocusPN dan Portal Lelang dengan Setoran PNBPN Bendahara Penerima KPKNL Bandar Lampung.

Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Data PNBP Fungsional DJKN

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	5d-CP Data PNBP Fungsional DJKN						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

6. Sasaran Strategis: Edukasi yang Efektif

Tujuan yang akan dicapai dari pemenuhan IKU ini adalah meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN, dan mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau *workshop*. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Capaian Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

K-Wide	Edukasi yang efektif						
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target		89	89		89	89	Max/TLK
Realisasi		96,40	96,40		94,17	95,29	
Capaian		108,31%	108,31%		105,80%	107,06%	

Perbandingan capaian Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Target dan Realisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada KPKNL Bandar Lampung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	85	85	85	87	88	89
Realisasi	90	90	90	90	95	95,29

7. Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilitasnya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	85%	85%	Max/TLK
Realisasi		61,54%	61,54%		98,80%	98,80%	
Capaian		120%	120%		116,23%	116,23%	

IKU terkait Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN pada Semester I telah tercapai dengan baik. Terdapat 35 total persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L dan terdapat 5 Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021.

Pada Semester II persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh pengelola barang yaitu sebesar 45 dan terdapat 20 jumlah persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang pada Semester I 2021.

8. Sasaran Strategis: SDM yang Kompeten

8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi. Bahkan bisa dikatakan SDM merupakan hal yang paling esensial dari seluruh *resources* yang diperlukan untuk sebuah organisasi berjalan dengan baik. Pada prinsipnya, pengembangan SDM (*Human Capital Development*) merupakan bagian dari manajemen SDM (*Human Capital Management*) yaitu *learning & development management*. Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara tugas/fungsi Jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, S1/ DIV, atau gelar akademik lainnya maupun Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (Unit Eselon IV) Pengembangan kompetensi pegawai dicapai dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada masing-masing seksi yang ada di KPKNL.

Terdapat 28 bawahan yang memenuhi kriteria dan 28 bawahan yang melebihi kriteria dalam pengembangan kompetensi pegawai dari jumlah total 258 pegawai. Berdasarkan hal tersebut perlunya peningkatan upaya atas rekomendasi diklat bagi pegawai yang memenuhi kriteria dan mempermudah pegawai untuk mengikuti diklat yang bersifat *massive*, dimana diklat ini bisa diikuti oleh semua pegawai tanpa terkecuali.

Capaian Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Persentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Wide	SDM yang kompeten						
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	24,17%	41,38%	41,38%	94,29%	120%	120%	
Capaian	120%	103,45%	103,45%	120%	120%	120%	

9. Sasaran Strategis: Organisasi yang *fit for purpose*

a. 9a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

Pada tahun 2020 DJKN mengusulkan 34 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM, dengan rincian:

- WBK : 28 unit kerja
- WBBM : 6 unit kerja.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan ZI WBK di wilayah KPKNL Bandar Lampung selama Tahun 2021;
2. Melakukan Pencanangan Pembangunan ZI WBK di wilayah KPKNL Bandar Lampung;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI WBK di wilayah KPKNL Bandar Lampung yang dilaksanakan tiap 1 (satu) bulan sekali;
4. Melakukan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja;

Tabel 3. 23 Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	9a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	75	75	Max/TLK
Realisasi					74	74	
Capaian					98,67%	98,67%	

Dalam Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK, pada akhir masa pengumuman, KPKNL Bandar Lampung dinyatakan belum layak untuk menerima predikat ZI WBK dari PermenPAN-RB sehingga Nilai Pemenuhan yaitu sebesar 74. Sementara Hasil Penilaian dari Tim Penilai Kementerian Keuangan (TPK) Pembangunan ZI WBK KPKNL Bandar Lampung yaitu:

- Nilai Pengungkit : 57,41
- Nilai Hasil : 39,45
- Nilai Total : 96,68

b. 9b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja

Sesuai dengan Penyampaian Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja Tahun 2021, KPKNL Bandar Lampung memperoleh nilai 90 (dari target nilai 75). Terdapat beberapa parameter atas penilaian pengelolaan kinerja berbasis BSC, yaitu :

1. Kualitas dokumentasi perencanaan kinerja
2. Dokumentasi pelaksanaan/eksekusi kinerja
3. Penilaian manual IKU Non Pemilik Peta Strategi
4. Kualitas dokumentasi monitoring dan evaluasi
5. Kualitas tindak lanjut monitoring dan evaluasi
6. Kualitas edukasi pengelolaan kinerja

Akar masalah dalam pencapaian IKU adalah karena minimnya pengetahuan pegawai terkait dengan pengelolaan kinerja. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk menghadapi masalah tersebut antara lain:

1. Telah dilaksanakan Pembahasan Penyusunan Kontrak Kinerja sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-28/WKN.05/KNL.0307/2020 perihal Undangan Pembahasan Penyusunan Kontrak Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2021 pda KPKNL Bandar Lampung.

2. Memberikan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja kepada para pegawai KPKNL Bandar Lampung melalui berbagai media, misalnya melalui Poster dan Media Sosial.

Capaian Nilai hasil review pengelolaan kinerja pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Nilai hasil review pengelolaan kinerja

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	9b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	75	75	Max/TLK
Realisasi					90,06	90,06	
Capaian					120%	120%	

c. 9c-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

Permasalahan yang dihadapi untuk terpenuhinya IKU tersebut antara lain:

1. Adanya *COVID-19* yang menyerukan *physical distancing* sehingga penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator dilaksanakan secara daring.

Upaya yang dilakukan untuk terpenuhinya IKU tersebut dilakukan dengan cara:

1. Berkoordinasi kepada pihak Kantor Pusat terkait tema *FGD* dan pelaksanaannya/
2. Meningkatkan koordinasi dengan Subbagian Umum terkait pelaksanaan *FGD* Pejabat Administrator pada Triwulan Selanjutnya.

Capaian Indeks efektivitas penyelenggaraan *FGD* Pejabat Administrator pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai

K-Wide	Organisasi yang fit for purpose						
	9c-N Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	96	96	96	97	96,60	96,60	
Capaian	119,63%	119,63%	119,63%	120,00%	120,00%	120,00%	

5. Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan Optimal

10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Tidak tercapainya Nilai Efisiensi yang maksimal dimana perhitungan PKPA Tahun 2021, Nilai Efisiensi memiliki bobot yang signifikan (IKPA 40% dan SMART DJA 60%)
2. Tidak maksimalnya Nilai IKPA dikarenakan keterlambatan eksekusi Belanja Modal yang mengakibatkan terganggunya nilai RPD dan nilai penyerapan sejak triwulan II yang terbawa hingga akhir tahun
3. Pada akhir Triwulan III, Kantor Pusat DJKN meminta bantuan untuk menyerap sisa dana Belanja Modal Turap/Pagar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan di Kantor Pusat yang berpengaruh terhadap Nilai efisiensi penyerapan anggaran.

Tindakan dan rekomendasi yang dilaksanakan di KPKNL Bandar Lampung:

1. Berusaha memenuhi target RPD penyerapan anggaran
2. Menyusun strategi penyerapan anggaran tiap bulannya guna efisiensi

Capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Bandar Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

K-Wide	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-20	Pol/ K P
Target	95,5%	-	95,5%	95,5%	95%	95%	Max/TLK
Realisasi	100,00%		100,00%	97,73%	94,85%	94,85%	
Capaian	104,71%		104,71%	102,34%	99,32%	99,32%	

Perbandingan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Target dan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Realisasi	107%	107%	87%	85%	100%	94,85%

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bandar Lampung mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021. Penyerapan anggaran mencapai 98% dari pagu yang diterima KPKNL Bandar Lampung sebesar Rp2.653.991.000 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pencapaian tersebut diperoleh dari komponen realisasi belanja barang dan belanja modal.

Berikut uraian realisasi anggaran KPKNL Bandar Lampung yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

Tabel 3. 28 Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung

	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
PAGU	-	Rp1.625.903.000,-	Rp1.028.088.000,-
REALISASI	-	Rp1.588.576.237,-	Rp1.025.321.586,-
PRESENTASE	-	97,70%	99,73%
SISA	-	Rp 37.326.763,-	Rp 2.766.414,-

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN, peta strategi dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Bandar Lampung. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum, pencapaian kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2021 telah sesuai dengan target dalam kontrak kinerja. Bahkan beberapa IKU mendapatkan nilai capaian di atas 100%. Ada 2 (dua) IKU yang belum mencapai target, yakni IKU "Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK" dengan nilai capaian sebesar 98,67% (status kuning) dan IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran" yang nilai capaiannya sebesar 99,32% (status kuning). Sedangkan delapan belas IKU status hijau dengan capaian rata-rata diatas 100%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2021 diketahui bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 112,13%.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung telah sesuai dengan target, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi "*Distinguished Asset Manager*" mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Bandar Lampung bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Bandar Lampung untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan asset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN